

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)” sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people’s choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan

mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.

- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a) Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b) Pemerataan (*equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

c) Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

b. Teori Pembangunan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Linear

Merupakan evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu Negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu (Kuncoro, 2003:47).

2) Teori Perubahan Struktural

Menjelaskan mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh Negara yang sedang berkembang, yang tadinya bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1991;1994).

3) Teori Dependensia

Menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh Negara berkembang. Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama adalah perekonomian Negara-negara maju dan kedua perekonomian Negara sedang berkembang.

4) Kaum Neo-Klasik Penentang Revolusi

Teori pembangunan Neo-Klasik anti terhadap pendekatan revolusioner yang disebut sebagai teori sisi penawaran (*supply side theory*). Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan.

5) Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan)

Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan

teknologi, pada penelitiannya Solow (1956) menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan.

6) Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen menyajikan kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (endogeneous) sistem ekonomi itu sendiri.

c. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

- 1) Pendapatan Per Kapita
- 2) Struktur Ekonomi
- 3) Urbanisasi
- 4) Angka Tabungan
- 5) Indek Kualitas Hidup
- 6) Indeks Pembangunan Manusia

d. IPM

Untuk menghitung angka IPM, maka diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut:

Tabel 2.1
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum
Angka IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Per kapita disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Sumber: BPS

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) di Tolikara-Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2005 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan

digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). (BPS, 2008)

1) Angka Harapan Hidup – AHH (*Life Expectancy*)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat. AHH dihitung berdasarkan hasil dari sensus dan survei kependudukan.

2) Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan pendidikan formal. Diasumsikan kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3) Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling*)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS digunakan agar dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan

diberbagai jenjang pendidikan yang dilihat dari lamanya pendidikan (dalam tahun) yang dapat ditempuh oleh setiap anak.

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level Kab/Kota.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambung menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Todaro (2006:19) menyatakan, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

b. Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Basuki dan Prawoto, dua hal esensial yang harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, **pertama**

sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. **Kedua**, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan harus diusahakan pertumbuhannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sumber-sumber Alam

Yakni meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim dan lain-lain.

2) Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang SDM yang dihadapi Negara berkembang pada umumnya adalah banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaanya rendah serta kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah pula.

3) Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Negara-negara berkembang belum mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas SDM yang berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan serta pendidikan dan pelatihan kerja.

4) Akumulasi Kapital

Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa dekade. Di Negara berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sulit untuk dilakukan.

c. Peranan Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Peranan pemerintah dalam perekonomian terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Peran Alokatif

Peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya dapat optimal dan mendukung efisiensi produksi.

2) Peran Distributif

Peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3) Peran Stabilitatif

Peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomiannya dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*.

4) Peran Dinamisatif

Peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta maju.

d. Fungsi Pemerintah

- 1) Memelihara pertahanan dan keamanan Negara.
- 2) Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan.
- 3) Menyediakan barang-barang public (*Public Goods*) yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta.

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

a. Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Pengertian upah adalah suatu imbalan yang diterima oleh seseorang buruh/karyawan dalam satu bulan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, pabrik dan industri atau pun lainnya. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok yang di dalamnya termasuk tunjangan tetap. (Panorama & Lemiyana, 2017)

Penetapan kebijakan pada upah minimum di Indonesia berdasarkan standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-undang No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan upah minimum harus didasarkan dari standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Kebutuhan hidup layak sendiri atau disingkat dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Serta, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

b. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan

Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Jika efektif, maka upah minimum dapat dijadikan alat untuk mengukur kemiskinan karena dapat membantu

masyarakat untuk dapat lepas dari kemiskinan. Dimana, upah minimum berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan pekerja. Upah minimum menggeser komposisi *employment* menuju pekerjaan dengan upah yang tinggi. Sehingga, peraturan pasar tenaga kerja tersebut nantinya dapat meningkatkan produktivitas rata-rata dan meningkatkan kesejahteraan. (Gunawan & Kurniawati dalam Acemoglu, 2017)

c. Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dapat terjadi dikarenakan adanya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya keterjangkauan akses di bidang pendidikan dan pekerjaan. (Chalid dan Yusuf dalam Bappeda, 2014)

Karena dengan kemiskinan seseorang memiliki daya beli yang rendah sehingga, kebutuhan hidup layak tidak dapat terpenuhi. Maka dari itu nantinya akan berdampak buruk terhadap pembangunan manusia, karena kebutuhan hidup layak merupakan salah satu unsur dari indeks pembangunan manusia. Sehingga, kemiskinan memiliki hubungan yang negatif terhadap indeks pembangunan manusia, dimana ketika angka IPM tinggi maka akan menurunkan angka kemiskinan tetapi, ketika angka kemiskinan meningkat maka angka IPM akan menurun. (Astuti, 2018)

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirno, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.

Pengeluaran pemerintah juga diartikan sebagai penggunaan uang serta sumber daya bagi suatu Negara untuk dapat membiayai kegiatan Negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dengan rumus:

$$Y = C + I + G + X - M$$

Formula ini merupakan identitas bagi pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Dimana Y menggambarkan pendapatan nasional, variabel G merupakan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*), I (Investment), X-M adalah net ekspor.

Pengeluaran pemerintah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat terdiri dari:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluarannya bersifat permanen dan terus menerus untuk kegiatan-kegiatan rutin. Seperti subsidi daerah otonom, belanja pegawai, belanja barang dan lainnya.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluarannya bersifat tidak rutin setiap tahunnya, dan bersifat temporer. Contohnya seperti, pembiayaan rupiah berupa pengeluaran pemerintah seperti barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek dan lain sebagainya.

2) Belanja Pemerintah Daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Jenis belanja daerah terbagi ke dalam:

a) Belanja Administrasi Umum

Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau pelayanan publik.

b) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan adanya aktivitas atau pelayanan publik.

c) Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggarandan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

d) Belanja Transfer

Pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk dapat pengembalian imbalan maupun keuntungan.

e) Belanja Tak Tersangka

Pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi dua bagian yakni teori makro dan teori mikro. (Prasetya, 2012)

1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang digolongkan sebagai berikut: (Boediono, 1999)

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran Pemerintah untuk Gaji Pegawai

Perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

3. Pengeluaran Pemerintah untuk *Transfer Payment*

Transfer payment merupakan catatan pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat.

2) Teori Mikro

Melalui teori mikro yaitu untuk dapat menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Rumus pengeluaran pemerintah dalam teori mikro sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X)$$

G = vektor barang publik

X = vektor barang swasta

I = individu; = 1.....m

U = fungsi utilitas

c. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk terpenuhinya salah satu hak dasar masyarakat,

yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Menurut Tjiptoherijanto, dilihat dari mutu manusia, yaitu dari sisi mutu kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Karena, aspek kesehatan mempengaruhi kualitas manusia. Jika terjadi kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi masyarakat maka akan pula mempengaruhi kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

d. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara yang maju bisa dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khususnya yang dimiliki oleh sektor pendidikan. (Mauriza dkk, 2013)

B. Penelitian Terdahulu

1. Sazli Mauriza, dkk (2013). “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh”, padapenelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kawasan Barat dan Timur Provinsi Aceh.
2. Baeti (2013). “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, data yang diteliti meliputi data pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan kesimpulan yang didapat adalah pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, dan alokasi pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
3. Isa (2011), menganalisis tentang “Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Penulis menggunakan variabel

belanja daerah, gini rasio, proporsi pengeluaran non makanan dan rasio ketergantungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah dan proporsi pengeluaran non makanan secara signifikan berpengaruh positif, sedangkan variabel gini rasio dan rasio ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Setiawan, dkk (2013). “Indeks Pembangunan Manusia”. Penulis menggunakan variabel produk domestik bruto dan pajak pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap IPM karena, peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Dan variabel PPN berpengaruh negatif terhadap IPM karena, peningkatan pajak pemerintah mengurangi *diposable income*, sehingga menurunkan kesejahteraan penduduk.
5. Chalid, dkk (2014). “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel upah minimum dan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

6. Heriyanto (2015), menganalisis tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010”. Penulis menggunakan variabel PDRB, anggaran pembangunan sosial, tingkat kemiskinan serta indeks pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, anggaran pembangunan sosial serta indeks pendidikan dan kesehatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan tingkat kemiskinan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
7. Maryani (2011), menganalisis tentang “Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”. Penulis menggunakan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan jumlah penduduk miskin secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM.
8. Bhakti (2012), menganalisis tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2008-2012”. Penulis menggunakan variabel PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga, APBD untuk pendidikan dan APBD untuk kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat simpukan bahwa variabel rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga dan APBD untuk pendidikan secara signifikan

berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Sedangkan pada variabel PDRB dan APBD untuk kesehatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 200-2012.

9. (Herman, 2018), menganalisis tentang “Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2009-2016”. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan upah minimum kota terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) yang berjudul “*Analysis of Factors Affecting Human Development Index in Indonesia*” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
11. Asmita, dkk (2017). “*Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province*”. Penulis menggunakan

variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, penduduk miskin dan distribusi pendapat di provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap IPM di Sumatra Utara. Sedangkan variabel presentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM di Sumatra Utara.

12. Silva dan Lopes (2012), menganalisis tentang “*A Regional Human Development Index for Portugal*”. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel hidup panjang dan sehat, angka harapan hidup, dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu hidup panjang dan sehat, angka harapan hidup dan pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Portugal.

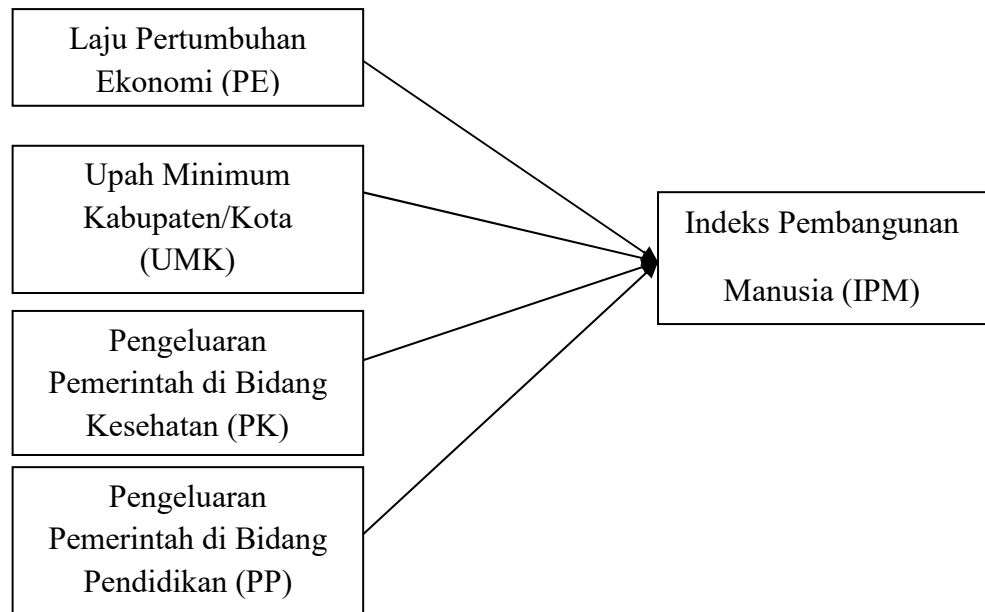
C. Kerangka Pemikiran

Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara diseluruh dunia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka indeks pembangunan manusia di provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan.

Pada pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi masih terkonsentrasi pada pembenahan bidang infrastruktur saja belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi investasi pada sektor publik yang masih rendah. (Usmaliadanti dalam Brata, 2011)

Sehingga diharapkannya pengalokasian dana bagi sektor kesehatan dan pendidikan yang setiap tahunnya meningkat dapat pula meningkatkan laju indeks pembangunan manusia Indonesia, namun yang terjadi sering kali perkembangan alokasi dana investasi pembangunan tidak sejalan dengan tingkat besarnya laju pertumbuhan pembangunan manusia. (Mulyaningsih, 2008)

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan model/kerangka pikir penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya informasi mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada **GAMBAR 2.2** sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka/Model Penelitian

D. Hipotesis

Pada penelitian menjelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi secara langsung memberikan manfaat yaitu dengan terjadinya peningkatan pendapatan. Terjadinya peningkatan pendapatan maka akan meningkatkan kualitas hidup manusia serta alokasi belanja rumah tangga ikut naik. Adanya aktivitas rumah tangga tersebut, maka memberikan kontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, maka:

- Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum kabupaten/kota adalah salah satu yang menjadi pertimbangan untuk investor menanam modalnya di suatu daerah. Terlebih bagi investor yang ingin mendirikan perusahaannya di suatu daerah, yang nantinya akan menyerap banyak pekerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Dengan semakin meningkatnya upah minimum kabupaten/kota, maka yang terjadi adalah semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan akan berpengaruh juga pada peningkatan indeks pembangunan manusianya di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, maka:

- Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Menurut Todaro, kesehatan ada kaitannya dengan pembangunan. Karena, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan yang nantinya dapat membentuk kemampuan manusia menjadi lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Sehingga, dengan meningkatnya kesehatan seseorang maka, akan berdampak pula nantinya pada meningkatnya pembangunan yang dapat meningkatkan indeks pembangunan suatu daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, maka:

- Diduga Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Anggaran yang dialokasikan pemerintah terhadap bidang pendidikan merupakan investasi guna meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, dan juga anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata terhadap seluruh penduduk di suatu daerah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan nantinya, akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Karena, semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan seseorang, maka akan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas guna dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, maka:

- Diduga Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia